

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perhatian terhadap kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat hanya dapat ditunjang bila pemerintah membantu dengan adanya dana anggaran sebagai penunjangnya maka peran pemerintah sangat besar dan penting. Siegel & H.R, (1989) menyimpulkan bahwa anggaran berdampak langsung pada masyarakat, terutama mereka yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan mendorong bawahan untuk membantu atasan dalam menyampaikan informasi yang mereka punya agar anggaran dapat disiapkan dengan lebih akurat (Baiman, 1980).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan kinerja sebagai suatu keluaran atau hasil dari program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja pegawai, penampilan hasil kerja tidak terbatas kepada pegawai yang memegang jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada seluruh pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan pegawai dalam suatu instansi/organisasi didalam merealisasikan rencana atau sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk

senantiasa menerima berbagai hal terhadap tuntutan lingkungannya, dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparansi dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah (Fauzan, 2017). Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang komprehensif di mana sebagai penggunaan garam akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki (Apriliani & Wijayanti, 2022).

Wirawan, (2009) menjelaskan kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Selain itu, Mangkunegara, (2012), menyatakan bahwa kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per jam). Sedarmayanti, (2011), juga menjelaskan bahwa kinerja organisasi merupakan produk banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, dan proses sumber daya manusia. Kinerja memerlukan strategi, tujuan, dan integrasi.

Menurut Deddi, (2006) kegunaan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja yang artinya anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa dijadikan patokan apakah suatu unit kerja kalau memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Dan agar anggaran itu tepat sasaran maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, hal tersebut dinamakan dengan partisipasi anggaran.

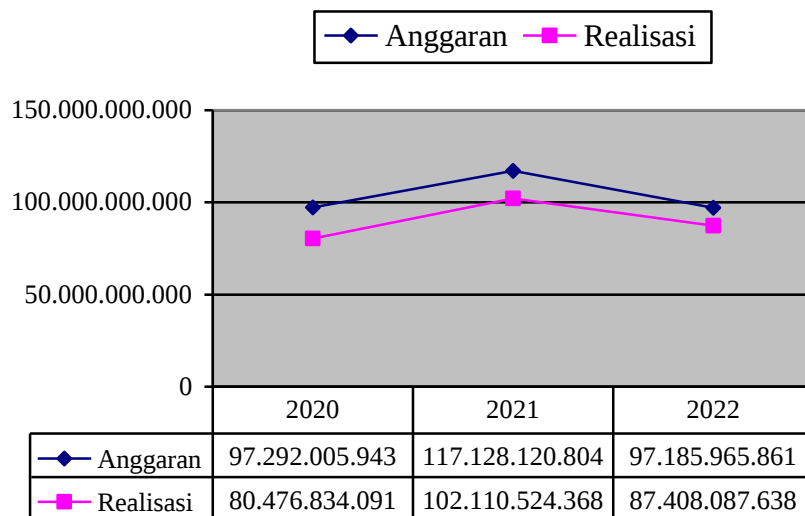
Partisipasi anggaran adalah penciptaan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga dapat tercapai tujuan institusi yang terkait. Aparatur daerah pada pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan penyusunan anggaran. Dengan adanya aparatur pemerintah yang ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan, akan membuatnya merasa dibutuhkan sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya (Kartika, 2010).

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja instansi pemerintah sudah secara luas dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya, penelitian yang telah dilakukan oleh Arifin, (2012), Andriani & Amanah, (2019), dan Hendra, (2018), menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi. Berbeda dengan hasil penelitian Sasando Dewi Soeksin et al., (2020), Tahar & Kuncahyo, (2020), dan Allorante, (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan negatif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja instansi pemerintah daerah.

Kapasitas individu adalah kemampuan atau kualitas seseorang untuk mengerjakan sesuatu melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitas kerja yang diperlukan melalui pendidikan formal, pelatihan yang pernah diikuti, serta pengalaman-pengalaman lainnya. Menurut Saputra *et al.*, (2017) Individu yang berkualitas adalah individu yang

memiliki pengetahuan dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal. Syakhroza, (2003) menyatakan bahwa gap yang sering terjadi dalam implementasi anggaran disebabkan oleh kurangnya kapasitas individu Indonesia atau pegawai sebagai penyusunan anggaran. Kapasitas individu yang diharapkan dalam penyusunan anggaran akan mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal, sehingga efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran dapat tercapai.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mansur, (2016), menyatakan bahwa kapasitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Bukti empiris penelitian sejalan dengan *resourcebased view* dan temuan penelitian Evanita, (2020), serta Rere & Retnani, (2018) yang menemukan bahwa kapasitas individu dapat meningkatkan kinerja manajerial. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnan, (2017) dan Budiani & Asyik, (2021) yang menunjukkan bahwa kapasitas individu berpengaruh negatif atau dapat menurunkan kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti semakin tinggi kapasitas individu, maka pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja instansi akan semakin tinggi. Jika manajer memiliki kapasitas individu yang rendah maka akan berdampak pada menurunnya kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas yang berdampak terhadap menurunnya kinerja instansi pemerintah daerah.



**Gambar 1. 1 Trend Anggaran Tahun 2020-2022
Dinas Kesehatan Kota Jayapura**

Pada data grafik trend anggaran dinas kesehatan kota Jayapura dari tahun 2020-2022 diatas, terlihat bahwa anggaran dinas kesehatan kota Jayapura mengalami kenaikan serta penurunan anggaran, dimana pada tahun 2020 anggaran yang ditargetkan dinas kesehatan kota Jayapura sebesar Rp 97.292.005.943 dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp 80.476.834.091, lalu pada tahun 2021 anggaran dinas kesehatan kota Jayapura mengalami kenaikan sebesar Rp 117.128.120.804 dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp 102.110.524.368, selanjutnya pada tahun 2022 anggaran nya mengalami sedikit penurunan dengan nilai anggaran sebesar Rp 97.185.965.861, dengan jumlah yang telah terealisasi sebesar Rp 87.408.087.638.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah. Hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1 Hasil Realisasi IKU Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Indikator Kinerja (Satuan %)		Predikat
		Tercapai	Tidak Tercapai	
1	2020	60,71	39,29	B (Baik)
2	2021	59,65	40,35	CC (Cukup baik)
3	2022	47,0	53,0	C (Kurang)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Tahun 2020-2022

Dilihat dari laporan realisasi anggaran dan LAKIP terkait indeks kinerja utama (IKU) dinas kesehatan kota Jayapura terlihat bahwa pada tahun 2020 hanya dengan anggaran Rp 97,2 M dinas kesehatan dapat menghasilkan nilai indeks kinerja 60,71% yang berpredikat B (baik). Lalu pada tahun 2021, anggaran yang diberikan meningkatkan menjadi Rp 117,1 M, namun indeks kinerja instansi menurun menjadi 59,65% berpredikat CC (Cukup Baik). Selanjutnya, pada tahun 2022, anggaran instansi mengalami penurunan dari tahun 2021 menjadi Rp 97,1 M namun indeks kinerja instansi malah jadi semakin menurun menjadi 47% berpredikat C (Cukup) padahal anggaran yang terealisasi nya sebesar Rp 87,4 M lebih besar dari anggaran yang digunakan (teralisasi) pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 80,4 M. Hal ini menandakan bahwa kinerja di Dinas Kesehatan Kota Jayapura masih jauh dari kata memuaskan karena disinyalir belum berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan penganggaran dan kapasitas atau kemampuan sumber daya nya dalam merencanakan anggaran belum optimal. Sehingga perlu adanya

pemetaan lebih jauh lagi terhadap faktor yang menyebabkan kinerja instansi belum optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam hal ini melihat bahwa partisipasi anggaran dan kapasitas individu menjadi hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait hubungannya terhadap kinerja instansi di Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Sehingga dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **"Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kapasitas Individu Terhadap Kinerja Instansi Di Dinas Kesehatan Kota Jayapura"**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi di Dinas Kesehatan Kota Jayapura?
2. Apakah kapasitas individu berpengaruh terhadap kinerja instansi di Dinas Kesehatan Kota Jayapura?
3. Apakah partisipasi anggaran dan kapasitas individu berpengaruh terhadap kinerja instansi di Dinas Kesehatan Kota Jayapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk menguji Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi di Dinas Kesehatan Kota Jayapura.

2. Untuk menguji Kapasitas Individu berpengaruh terhadap kinerja instansi di Dinas Kesehatan Kota Jayapura.
3. Untuk menguji Partisipasi Anggaran dan Kapasitas Individu secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi di Dinas Kesehatan Kota Jayapura.

1.4 Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran dan dapat menjadi referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya serta untuk menambah wawasan penulis dalam mengetahui Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kapasitas Individu terhadap Kinerja instansi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan bukti empiris bagi pembaca dan siapa saja yang ingin mengetahui Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kapasitas Individu Terhadap Kinerja instansi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, dibuat rancangan penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan landasan teori, riset sebelumnya & pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran, pengujian instrumen, dan alat analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Tapi ini membahas hasil pengolahan data dan analisis hasil pengujian hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Tapi ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran dari penulisan.